



## Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Tuban

Faradila Sofia Nur Faj'jrina\*, Sri Wibawani

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

\*faradilasofia3@gmail.com

### Abstract

*Policy is a government activity aimed at providing positive impacts for the wider community. The success of a policy is determined not only by its formulation process but also by its implementation. The implementation of the subscription parking policy in Tuban Regency has shown quite effective results with the involvement of various stakeholders working together with the Tuban Regency Environmental and Transportation Agency, leading to an increase in parking fee revenue. Therefore, this study aims to further examine the implementation of the subscription parking policy in Tuban Regency. The research method used in this study is a qualitative descriptive method, analyzing based on Adam Smith's Implementation Model with several research focuses, including idealized policy, target groups, implementing organization, and environmental factors. The results of the study show that the focus on idealized policy has been effective, as evidenced by the interactions initiated by policy formulators such as the Environmental and Transportation Agency, the Regional Revenue Management Unit (UPT PPD), BPKPAD, the police, official parking attendants, and parking service users. The focus on target groups has been effectively achieved by raising public awareness and ensuring the safety and comfort of parking service users. However, the implementing organization was less effective due to insufficient attention to parking service users. The focus on environmental factors, influenced by cultural, social, economic, and political elements, supports the success of the subscription parking policy in Tuban Regency.*

**Keywords:** Public Policy; Policy Implementation; Subscription Parking Policy

### Abstrak

Kebijakan adalah aktivitas pemerintah yang bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh proses pembuatannya, tetapi juga oleh implementasinya. Implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban menunjukkan hasil yang cukup efektif dengan adanya keterlibatan berbagai stakeholder yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban dan peningkatan pendapatan retribusi parkir sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis berdasarkan model Implementasi Adam Smith dengan beberapa fokus penelitian, diantaranya adalah kebijakan ideal (idealized policy), Target groups (kelompok sasaran), Implementing organization (badan pelaksana), Environmental factors (faktor lingkungan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fokus idealized policy telah berjalan efektif, dibuktikan melalui interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD), BPKPAD, Kepolisian, juru parkir dinas, dan pengguna layanan parkir. Fokus target groups berhasil efektif mencapai target dengan meningkatkan kesadaran masyarakat serta memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna layanan parkir. Namun, implementing organization kurang efektif karena kurangnya perhatian terhadap

pengguna jasa parkir. Fokus environmental factors, dipengaruhi budaya, sosial, ekonomi, dan politik, mendukung keberhasilan kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban.

## **Kata Kunci: Kebijakan Publik; Implementasi Kebijakan; Kebijakan Parkir Berlangganan**

### **Pendahuluan**

Kebijakan adalah aktivitas pemerintah yang bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Menurut Agustino (2022) keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh proses pembuatannya, tetapi juga oleh implementasinya. Kebijakan publik dibuat untuk menangani masalah agar lebih tertata, memperlancar kenyamanan dan keamanan publik, dan mempengaruhi cara bertindak masyarakat. Thomas R. Dye dalam Pramono (2020: 31) menyatakan bahwa pemerintah memilih segala sesuatu yang akan dilakukan atau tidak dilakukan sebagai kebijakan publik, dan kebijakan ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya.

Aslinda (2023) menyatakan bahwa kebijakan selalu berada dalam suatu sistem, yaitu sistem perumusan, implementasi, dan evaluasi. Studi kebijakan melibatkan berbagai dimensi dan menawarkan solusi untuk berbagai masalah yang muncul. Fokus utama kebijakan publik adalah pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Nugroho menambahkan bahwa di negara berkembang, segala aspek kebijakan publik dikembangkan seperti di negara maju, melibatkan implikasi politik yang erat terhadap formulasi, implementasi, dan kontrol politik sebagai aspek manajerial.

Dye dalam Kasmad (2018) menjelaskan bahwa tahapan kebijakan publik terdiri dari lima langkah: identifikasi masalah, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Setiap tahapan memiliki fungsi dan peran yang saling mendukung untuk mencapai kesuksesan kebijakan publik. Analisis kebijakan publik diperlukan untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam tataran politik guna menyelesaikan masalah-masalah kebijakan, memanfaatkan teori, metode, dan teknik dari berbagai bidang ilmu untuk pemecahan masalah yang lebih komprehensif dan efektif.

Implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban menunjukkan hasil yang cukup efektif dengan adanya keterlibatan berbagai stakeholder yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban dan peningkatan pendapatan retribusi parkir. Hal ini dibuktikan dari pendapatan retribusi dari penerapan kebijakan parkir berlangganan mengalami kenaikan dan melampaui target yang telah ditentukan. Hanya di saat era Covid-19 pendapatan sedikit menurun dari target awal yang ditentukan. Hal tersebut dikarenakan adanya potongan pembayaran pajak dari pemerintah akibat adanya Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian masyarakat sempat menurun, keberhasilan implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik, yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan parkir dan retribusi daerah, serta memastikan kepentingan masyarakat terpenuhi.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebab penelitian ini berpotensi untuk menghasilkan sebuah penelitian yang sinkron dengan keadaan yang sedang diteliti. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban, sehingga fakta atau data yang ada di lapangan mengenai implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban berusaha digambarkan dan dijelaskan oleh penulis

kepada pembaca. Penjelasan secara detail juga bermanfaat bagi pembaca supaya dapat bayangan keadaan di lapangan, sehingga tidak berasumsi secara pribadi dan menyebarkan berita hoax kepada masyarakat luas. Fokus penelitian menggunakan model Implementasi Adam Smith dalam (Aslinda, 2023: 129-130) dengan beberapa fokus penelitian, diantaranya adalah *idealized policy*, *Target groups*, *Implementing organization*, *Environmental factor*. Sumber data yang digunakan adalah dari data primer yang bersumber dari observasi dan wawancara di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Keselamatan Jalan. Serta sumber data sekunder yang dikumpulkan misalnya lewat dokumen yang dapat berbentuk skripsi, jurnal, buku, arsip, laporan, berita media cetak online maupun offline, dan lainnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban.

## **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan temuan penulis terhadap data di lapangan mengenai Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Di Kabupaten Tuban, temuan tersebut digambarkan dan diinterpretasikan berdasarkan teori yang relevan. Menurut Reswa (2015) dalam (Ksatrio Witjaksono & Wibawani, 2022: 1) dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah dituntut untuk semakin inovatif dalam membuat kebijakan, sehingga fasilitas parkir dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup di wilayah Kabupaten Tuban.

Melalui data hasil penelitian tersebut untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan hasil wawancara dan observasi dengan para informan secara langsung maupun tidak langsung. Didukung dengan dokumentasi untuk menunjang data-data. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari Adam Smith (1973) yang memandang suatu kebijakan sebagai proses atau alur. Proses implementasi kebijakan yang diusulkan menurut Smith terdiri dari empat variabel, yaitu:

### **1. *Idealized Policy***

Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 Pasal 3 bertujuan guna terwujudnya tertib pengelolaan operasional parkir, juru parkir, pengguna lahan parkir, dan pemungut retribusinya. Perubahan dari sistem parkir konvensional ke berlangganan ini didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi peningkatan jumlah kendaraan dan masalah parkir yang semakin kompleks. Pemerintah daerah, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Keselamatan Jalan, berupaya memastikan mereka memahami dan mematuhi kebijakan ini. Hal ini sesuai dengan pendapat (Meirinawati & Prabawati, 2015) dalam (Vipriyanti & Meirinawati, 2021: 228) yang menyatakan bahwa Instansi pemerintah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap instansi tersebut sesuai dengan tata cara dan aturan pokok yang telah ditentukan.

Penelitian dari (Ksatrio Witjaksono & Wibawani, 2022: 4) juga menjelaskan kejelasan tujuan dari pelaksanaan atau implementasi kebijakan parkir sudah tercantum pada peraturan. Sehingga, keberhasilan pengelolaan operasional parkir, dilakukan dengan koordinasi yang efektif antara juru parkir, pengguna lahan parkir, dan pemungut retribusi, serta adanya kesadaran dan keseriusan dalam menjaga kebersihan dan ketertiban di wilayah parkir. Hal tersebut telah diatur pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pasal 3.

Implementasi kebijakan parkir berlangganan telah menunjukkan hasil yang positif sesuai dengan tujuan dan Perda Kabupaten Tuban No. 38 Tahun 2017 yang bertujuan guna terwujudnya tertib pengelolaan operasional parkir, juru parkir, pengguna lahan parkir, dan pemungut retribusinya. Ketercapaian ini dilihat dari adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan memastikan keselamatan serta kenyamanan pengguna layanan parkir. Penelitian menunjukkan bahwa tujuan kebijakan ini sudah tercapai, seperti tercantum dalam peraturan yang berlaku, dengan adanya interaksi yang efektif antaran interaksi dengan pengguna jasa layanan parkir berlangganan, teraksi dengan juru parkir, interaksi dengan kepolisian, aatan melaksanakan penerapan implementasi kebijakan parkir berlangganan.

## **2. Target Groups**

Faktor penting dalam kesuksesan kebijakan adalah kelompok sasaran, yaitu pengguna jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum. Penyesuaian pola aktivitas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah bentuk interaksi yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Menurut Rohmatin (2019), peran adalah perilaku yang diharapkan dari individu atau kelompok dengan tanggung jawab tertentu, yang dalam konteks ini adalah partisipasi aktif dalam melaksanakan kebijakan parkir berlangganan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sesuai dengan Peraturan Bupati telah diatur mengenai Standart Operasional (SOP) juru parkir merupakan *target groups* oleh pihak Dinas sebagai implementor di lapangan langsung. Vipriyanti & Meirinawati (2021) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan parkir berlangganan sangat tergantung pada penilaian dari masyarakat pengguna jasa parkir. Perubahan pola pembayaran dari konvensional menjadi berlangganan tahunan memudahkan masyarakat dan menghilangkan pungutan liar. Namun, di lapangan masih terjadi praktik pungutan oleh juru parkir meskipun masyarakat sudah membayar retribusi parkir berlangganan. Pengguna parkir berlangganan seharusnya tidak diwajibkan membayar lagi di tepi jalan umum, yang ditandai dengan sticker parkir berlangganan pada kendaraan mereka.

Berdasarkan indikator *target groups*, penyesuaian pola aktivitas dan perilaku dari implementasi kebijakan parkir berlangganan dinilai berhasil. Masyarakat membayar retribusi sesuai aturan yang ada dalam Peraturan Daerah, meskipun ada yang merasa terpaksa karena peraturan yang berlaku. Pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan melalui kampanye, edukasi, dan informasi yang jelas agar mereka memahami manfaat kebijakan parkir berlangganan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih aktif dan partisipatif dalam mendukung kebijakan ini, sehingga kebijakan parkir berlangganan dapat diimplementasikan lebih efektif dan efisien.

## **3. Implementing Organization**

Implementing organization atau implementor merupakan variabel penting menurut Adam Smith dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Para implementor, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Kepolisian Resort Tuban, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), serta Juru Parkir Dinas, memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan kebijakan parkir berlangganan. Mereka perlu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang peran dan tanggung jawab mereka untuk mengelola kebijakan ini secara efektif. Badan-badan pelaksana ini membantu implementor dalam mengumpulkan data, mengembangkan strategi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan untuk memastikan kebijakan parkir berlangganan diimplementasikan dengan efisien. Hal tersebut dilakukan apabila terjadi ketidaksesuaian Standart Operasional Prosedur (SOP) dapat dilakukan teguran tertulis 1 sampai 3 kali, dan yang ketiga ini biasanya adalah surat pemecatan. Teguran pihak Dinas terhadap juru parkir dinas tersebut dapat dilihat dari gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Penegakan Disiplin Terhadap Juru Parkir Dinas  
Sumber: Facebook Parkir Berlangganan Kabupaten Tuban  
(Diakses pada 18 Maret 2024)

Penegakan ketidaksesuaian juru parkir ini dilakukan sebab peran juru parkir sangat penting dalam memastikan kebijakan parkir berlangganan mencapai tujuannya, guna terwujudnya tertib pengelolaan operasional parkir, juru parkir, pengguna lahan parkir, dan pemungut retribusinya. Menurut Mazmanian dan Sabitzer, serta Rohmatin, kegagalan implementasi sering disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, kerja sama yang efektif antara Pemerintah Daerah, Dinas terkait, dan para stakeholders sangat penting. Prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi harus diterapkan untuk memastikan semua bidang bekerja harmonis dan efisien dalam melaksanakan tugas mereka.

Implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban sudah dinilai berhasil meskipun ada pro dan kontra. Pemerintah Daerah terus melakukan langkah strategis untuk mengatasi hambatan, baik di lapangan maupun di dalam kantor, melalui musyawarah dan mufakat. Standar Operasional Prosedur (SOP) dijadikan pedoman bagi para implementor untuk memberikan pelayanan terbaik. Juru parkir yang lalai dalam tugasnya akan ditindak sesuai aturan, dan masyarakat bisa menyampaikan saran atau laporan melalui web aduan atau nomor WhatsApp yang disediakan oleh Dinas. Peninjauan rutin oleh Dinas dan Polres setempat memastikan kepatuhan terhadap kebijakan. Semua stakeholders dituntut untuk meningkatkan profesionalisme, pemahaman tentang substansi hukum, dan mengenali perilaku masyarakat setempat untuk menyampaikan kebijakan secara efektif dan diterima dengan baik.

#### **4. *Environmental Factors***

Variabel terakhir yang dikemukakan oleh Adam Smith adalah unsur lingkungan, yang meliputi aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Keempat unsur ini berperan dalam mempengaruhi keberhasilan kebijakan parkir berlangganan. Menurut Pereda, Schneider, Perico, & Cristia (2017) dalam Vipriyanti & Meirinawati (2021), Kebijakan untuk menciptakan fasilitas parkir yang sesuai dengan dinamika pertumbuhan dan perubahan kabupaten atau kota dikembangkan oleh pemerintah, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, namun, kebijakan tersebut juga memberikan peluang untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Faktor budaya mencakup kesinambungan antar unsur, terutama pada faktor sosial. Rohmatin (2019) menyatakan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap parkir berlangganan serta sikap apatis masyarakat. Sehingga implementasi kebijakan ini membutuhkan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa berjalan sesuai rencana, seperti dijelaskan oleh Anggara (2014)

dalam Ksatrio Witjaksono & Wibawani (2022) bahwa pengawasan yang ketat dibutuhkan agar implementasi berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan.

Pengawasan ketat terkait implementasi kegiatan kemudian dilakukan dengan dilaksanakannya kegiatan apel rutin dilaksanakan setiap hari Senin pada pagi dan sore hari. Bertujuan untuk melatih kedisiplinan dari datang harus tepat waktu dan berisikan amanat dari Dinas untuk selalu mematuhi Standart Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan pelayanan terhadap kebijakan parkir berlangganan. Hal lain yang disampaikan dalam apel rutin tersebut selain membahas Standart Operasional Prosedur (SOP) juga membahas terkait dengan penunjang operasional, pelaporan kritikan dan saran dari masyarakat, persiapan jika ada acara, dan lain-lainnya, sebagaimana hasil dokumentasi penulis dibawah ini;



Gambar 2. Apel Juru Parkir Dinas Sebelum Bertugas  
Sumber : Dokumentasi Penulis, 2024

Berdasarkan indikator *enviromtmental factors*, yang mempengaruhi implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban sudah dinilai berhasil. Hal ini dilakukan dengan strategi melalui kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban melalui pihak Dinas mengembangkan sistem kerja yang dinamis dan fleksibel, disesuaikan dengan perubahan lingkungan. Kolaborasi antar pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan parkir berlangganan sangat penting untuk efektivitas dan efisiensi. Tujuan dari sistem kerja ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul, memastikan bahwa kebijakan parkir berlangganan serta manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan perlu diberikan.

## Kesimpulan

Kesimpulan penelitian dari Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Tuban berdasarkan teori implementasi Adam Smith, bahwa fokus *idealized policy* telah berjalan secara efektif yang dilihat dari Interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan seperti pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD), Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Kepolisian, juru parkir dinas, dan pengguna jasa layanan parkir berlangganan berhasil mendorong dan mempengaruhi kelompok sasaran.. Fokus *target groups* berhasil efektif mencapai target hal ini dibuktikan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan keselamatan serta kenyamanan pengguna layanan parkir. Pengguna layanan jasa parkir berlangganan telah taat membayar retribusi dan juru parkir dinas juga melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan. Namun, fokus

*implementing organization* kurang efektif karena kurangnya perhatian terhadap pengguna jasa layanan parkir, meskipun juru parkir dinas telah mengikuti SOP yang diberikan. Secara umum, Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Tuban sudah cukup efektif dengan adanya keterlibatan berbagai instansi dalam perumusan kebijakan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan terus melakukan patroli dan apel untuk memastikan juru parkir melayani sesuai SOP, meskipun ada beberapa kendala seperti kurangnya pengingat bagi pengguna jasa untuk mengambil stiker parkir setelah pembayaran STNK tahunan dan ketidaksesuaian jam operasional juru parkir dengan SOP. Terakhir, fokus *environmental factors* yang dipengaruhi oleh budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang secara keseluruhan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan hubungan antar instansi yang lebih erat.

### Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2)*. Bandung: Alfabeta.
- Aslinda. (2023). *Model Kebijakan Publik Dan Teori Perubahan Kebijakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: K-Media.
- Fatimah, S., & Rodiyah, I. (2018). Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo). *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*.
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik: Evaluasi Reformasi Formulasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Ksatrio Witjaksono, D., & Wibawani, S. (2022). Implementasi Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Parkir. *JKP: Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 1–10.
- Miles, Matthew. B., Huberman, A. Michael., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). New York: SAGE Publications Inc.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurachman, M. (2023). Analisis Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan Periode 2021-2022 (Studi Empiris Kabupaten Sumedang). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(4), 97–104.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Pradana, G. W. (2021). Kebijakan Parkir Elektronik Sebagai Salah Satu Wujud Penerapan Smart City Di Kota Surabaya. *GEMA PUBLICA*. 6 (2).
- Purnantoro, A. D., & Lituhayu, D. (2017). Evaluasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kota Mojokerto. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rohmatin, A. (2019). *Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Kesadaran Parkir Berlangganan Sebagai Upaya Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. Surabaya: Brilliant.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. Bandung: ALFABETA.
- Kasmad, R. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Raviansyah. (2022). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik* (1st ed.). Riau: Get Press

- Setiawan, A. B., & Widiyarta, A. (2022). Kualitas Pelayanan Parkir Berlangganan Di Kota Pasuruan. *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*. 7(1).
- Watimena, M. A., & Puturuhu, D. (2022). Implementation of Parking Retribution and Illegal Parking Management and Their Effect on Original Local Government Revenue. *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*. 3(2).
- Vipriyanti, S., & Meirinawati. (2021). Kualitas Pelayanan Parkir Berlangganan Untuk Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 227–240.